**SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU POLITIK**

1. **Sejarah perkembangan Ilmu politik di Zaman Yunani Kuno**

Ilmu Politik merupakan cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar dan ruang lingkup yang sudah jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, anthropologi. Dalam perkemangan ini mereka saling mempengaruhi.

Padahal secara embrio yang lebih luas dan berorganitas, pembahasan tentang negara sudah ada sejak 450sM di Yunani Kuno. Seorang ahli sejarah Herodutus(480-430sM), maupun filsuf-filsuf ternama Yunani seperti Plato(427-347sM) karya-karyanya *politeia* (tentang politik), *kriton* (tentang ketaatan terhadap hukum), dan Aristoteles ( 384-332sM) sudah banyak bericara tentang politik.[[1]](#footnote-1)

Filsafat politik tidak berawal dari ilmu pengetahuan, melainkan bertolok dari pemakaian akal sehat dalam tujuan-tujuan manusia. Mulailah paradigma rasional menggantikan pandangan dunia yang lebih irasional dan mistik yang hidup sebelumnya,seperti dewa-dewa.

Kemudian, ilmu pengetahuan mengantikan hal itu yang tidak terduga sebelumnya melalui keteraturan. Keteraturan tidak lagi berasal dari paradigma mistik, melainkan paradigma ilmiah. Orang Yunani mulai menyingkirkan peranan para dewa dengan objek rasional seperti halnya atom temuan Democritus(460-370sM).yang merupakan bahan dasar dunia yang tidak dapat diperkecil, tidak bertahan lama bahkan meluas kehidupan sosial.

Demikianlah awal tradisi intelektual bangsa yunani, tidak sekaligus menerima ilmu analisis ilmu pengetahuan, namun mereka menerima analisis moral. Di sini Scorates (469-399sM) merupakan orang pertama yang menyadari bahwa ilmu alam tidak memberikan penjelasan memadai untuk perilaku manusia. Karena itu wajar jika dalam ilmu pengetahuan kuno belum mampu memberikan rumusan teori. Begitu pun dalam ilmu politik, munculnya slogan”filsafat politik dibatasi etika” itulah sebabnya pada dekade ini, politik merupakan suatu fungsi antara penguasa dan yang dikuasa, baik pemerintah yang dijalankan satu orang ataupun beberapa orang. Yang penting setiap pemerintah mampu mendatangkan kebajikan. Dengan demikian, model politik klasik sebelum plato, cukup terdiri atas penguasa dan yang dikuasai, cara dan tujuan. Dalam paradigma politik waktu ituyang terpenting adalah bagaimana untuk mencari keselarasan atau keseimbangan antara penguasa dan dikuasai seagaimana untuk tujuan bersama.

Plato dalam bukunya Politea, menyatakan negara itu seperti tubuh yang berkembang dari beberapa individu yang terorganisasi. Adapun bentuk-bentuk itu antara lain :

1. Aristokrasi : kekuasaan dipegang para cendekiawan/pintar yang diutamakan keadilan dan kepentingan bersama.
2. Timokrasi : sekelompok penguasa (elit) yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dan karena itu tidak adil.
3. Oligarchie : kekuasaan negara dipegang kaum hartawan (konglomerat) dan berkembanglah kepemilikan swasta.
4. Demokrasi : pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan kepentingan umum diutamakan, disamping kebebasan/kemerdekaan.
5. Tyrani : pemerintahan dipegang seorang dan biasanya tidak adil dan mementingkan dirinya atau keluarganya.

Para filosof pada zaman ini berusaha mencari esensi keadilan dan kebaikan, juga mempertimbangkan masalah-masalah esensial lainnya seperti pemerintahan yang baik, kedaulatan, kewajiban negara terhadap warga negara dan sebaliknya. Beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500 S.M. Begitupun filsuf cina kuno Kung Fu-Tze/ Confusius ( 551-479sM), Meng-Tse(Mencius), dan Lie-Tze(350sM) seorang perintis legalitas telah banyak berbicara tantang politik.[[2]](#footnote-2) Ada banyak sekali tokoh-tokoh yang memliki pemikiran yang menggugah dunia di Timur. Mereka muncul dari beberapa Negara yang mempunyai kebudayaan dan agama yang berbeda seperti Islam, Cina dan India. Tapi budaya dan agama itu juga yang menjadi persamaan ciri dari tokoh-tokoh ini. Karena dasar-dasar pemikiran politik mereka masih sangat dipengaruhi ajaran agama, dan warisan budaya mereka masing.[[3]](#footnote-3) Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dan bandingkan perbedaan dan persamaan tersebut dalam penjelasan singkat berikut:

1. **Al- Farabi** - Dalam pemikiran politik al-farabi terlihat jelas dilandasi oleh filsafat kenabian, dalam hal ini al-farabi dapat tergolong filosof politik yang idealistic. Al-farabi memang memfokuskan perhatiannya pada pemimpin atau kepala Negara serta kaitannya dengan system pemerintahan.[[4]](#footnote-4)
2. **Al – Mawardi -** Bila al-farabi bersifat idealistic dan mengutamakan pemikiran politiknya tentang kualitas pemimpin, maka Al-Mawarbi cenderung lebih realistic dan berorientasi pada masalah konstitusi kenegaraan. Al-Mawardi ternyata lebih dulu memperkenalkan kontrak social pada awal abad XI M, dan baru lima abad kemudian bermunculan teori kontrak social di Barat
3. **Ibnu khaldun -** Ibnu khaldun mengemukan bahwa system politik itu sangat diperlukan untuk terwujudnya stabilitas, dan nuansa politik tersebut amat relevan dengan kondisi manusia sebagai makhluk social-politik. Pemimpin tidak harus memiliki jarak jauh dengan rakyat. Konsep kepemimpinan *primusinterpares* ternyata telah diperkenalkan oleh Ibnu khaldun.
4. **Confucius -** Dari berbagai pemikran Confucius atau Kong Hu Cu, terutama yang berkaitan dengan politik lebih menekankan bagaimana menjadi penguasa, pemerintah dan pejabat yang baik yaitu yang mengutamakan kepentingan rakyat. Rakayta sangatlah penting mengingat banyak rakyat yang menjadi korban ambisi dan kepentingan penguasa. Confucius juga meyakini adanya tuhan yang disebut Tien. Dan dekat dengan alam sebagaimana pemikir Cina lainnya. Denganbegitu dalam setiap pemikirannya mengenai pemerintahan adalah tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi segenap rakyat tanpa terkecuali.
5. **Lao Tzu -** Dalam teori politik Lao Tzu, penganut Taonisme sepakat dengan kaum Confucianisme, bahwa Negara idaman ialah Negara yang dikepalai manusia bijaksana. Hanya manusia bijaksanalah yang dapat dan seharusnya memerintah. Tetapi perbedaan diantar kedua mazhab tersebut adalah bahwa menurut kaum Conficianisme , bila seorang manusia bijaksana menjadi penguasa ia seharusnya berbuat banyak bagi rakyatnya, sedangkan menurut kaum Taonisme, kewajiban penguasa bijaksana bukan berbuat banyak tapi meniadakan perbuatan apapun. Menurut Lao Tzu, kesulitan-kesulitan yang terjadi di dunia bukan disebabkan banyak hal yang belum di kerjakan, melainkan karena terlalau banyak hal yang telah di kerjakan[[5]](#footnote-5)
6. **Mahatma Gandhi -** Mohandas Karamchad Gandhi, seorang pemikir politik di India dan pejuang yang memerdekan India. Membacaa karya India dan buku pengetahuan, hukum, pemerintah, dan tentang Tuhan merupakan favoritnya. Ahimsa (tidak melukai) ajaran Gandhi yang terkenal, ajaran ahimsa adalah dasar dan pedoman untuk bertindak. Tujuannya untuk menegakkan kebenaran. Ciri ahimsa adalah penyesuaian dan pembaharuan yang tiada henti. Ada 3 bentuk tindakan bersifat ahimsa yaitu, non cooperation, ketidakpatuhan sipil, dan puasa. Yang paling utama adalah non cooperation dimaksudkan menolka untuk mengambil bagian dalam system yang tidak adil. Tuhannya adalah untuk perubahan struktur masyarakat yang tidak adil, yang membuat orang menderita.
7. **Perkembangan Ilmu politik di Zaman Romawi**

Pada zaman ini yang terkenal dengan Romawi Kuno memerikan sumbangan yang berharga bagi ilmu politik antara lain: bidang hukum, yurisprudensi, dan administrasi negara. Bidang tersebut didasarkan atas perspektif mengenai kesamaan manusia, persaudaraan setiap orang , ketuhanan dan keunikan nilai individu yang bagaimanapun rendahnya, mempercayai cahaya tuhan menjiwai seluruh semesta. Filsafat demokrasi dengan asumsinya tentang rasionalitas, moralitas dan persamaan serta konsepnya tentang hukum alam dan hak-hak alamiah, banyak menurun dari faham stoic dan cicero, yang memadukan filsafat stoic kedalam pemikiran barat.[[6]](#footnote-6)

1. **Perkembangan Ilmu politik pada Abad Pertengahan**

Kemudian selama abad pertengahan, Negara menjadi kurang penting dibandingkan gereja, yang bisa memaksakan kekuasaanya pada raja dan memecat para pangeran dan mengatur kebijakan umum. Dibawah dominasi intelektual dan politik gereja Kristen, pemikiran politik pada abad pertengahan peratama-tama berurusan dan untuk menjawab persoalan mengenai yang seharusnya (nilai), bukan pertanayaan tentang yang ada (fakta). Hal itu juga berbeda dengan paradigma teokratis, dimana ide hukum alam kehukum manusiawi. Akan tetapi dunia kristen menampilkan kembali pandangan dunia agama. Santo agustinus (354-430) merupakan tokoh pertama yang menegaskan politikus theokratis dan ada Thomas Aquinas (1225-1274) yang memberikan gambaran pentingnya hokum sebagai roda penggerak kehidupan kemasyarakatan.

Pada akhir abad pertengahan dua prinsip penting yang muncul mendorong transisi kemasa pencerahan yang dimulai abad ke-16.

1. bahwa penguasa atau raja merupakan wakil rakyat, dengan lingkup kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi yang sifatnya terbatas.
2. bahwa komunitas politik bukan terdiri dari hak-hak pribadi semua individu, melainkan hak-hak dewan perwakilan. Rakyat diwakili bukan dalam kedudukan perorangan mereka, tetapi dalam kedudukan politik sebagai warga negara (Apter, 1996: 74). Sebuah dewan perwakilan menjalankan pengawasan terhadap penguasa. Hal ini merupakan dasar hak-hak individu dan perwakilan.

Dalam hal ini terdapat peristiwa penting, diantaranya kemenangan kerajaan atas gereja dalam perjuangan besar antara raja dan paus. Kemudian ketika visi sintesa paham Kristen abad pertengahan yang domain merosot, para penguasa menjadi makin asyik untuk mempertahankan kekuasaan yang menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Paradigma teokratis akhirnya tergeser oleh suatu persekutuan sekuler antara raja dan sebagian filosof politik baru yang akhirnya digantikan oleh pencerahan. Sejak itu hak-hak rakyat bukan kekuasaan penguasa dan cara-cara melindunginya menjadi perhatian utama politik. Pemecahan universal haruslah pemerintahan perwakilan, yan dikenal dengan demokrasi politik (Apter, 1996: 76).[[7]](#footnote-7)

1. **Sejarah perkembangan Ilmu politik pada permulaan Zaman Modren**

Tokoh utama pada transisi ini adalah Niccolo Machiavelli (1469-1527). Dia-lah yang merasa jemu dengan pertengkaran-pertengakaran doktrin, dan ia membuka jalan bagi pemikir kekuasaan yang sekuler.

Machiaveli percaya bahwa rezim-rezim masuk kedua tipe, yaitu “kepangeranan” (*principality*) dan “republik”. Dalam *The Prince*, ia memberikan nasihat tentang bagaimana mendapatkan dan mempertahankan sebuah kepangeranan. Untuk melakukannya seorang penguasa bijak hendaknya mengikuti jalur yang dikedepankan berdasarkan kebutuhan, kejayaan, dan kebaikan negara. Hanya dengan memadukan *machismo*, semangat keprajuritan, dan pertimbangan politik, seseorang penguasa barulah dapat memenuhi kewajibannya kepada negara dan mencapai keabadian sejarah (Losco dan William, 2005: 561).[[8]](#footnote-8)

 Sebaliknya Machiavelli mengalihkan perhatiannya dalam *Discourses* (Sebuah komentar tentang sejarah Roma yang ditulis Livius), menekankan tentang penciptaan, penjagaan, dan renovasi sebuah pemerintahan republik yang demokrasi. Perhatian utamanya adalah untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan-pemerintahan republik dapat mendorong stabilitas dan kebebasan sambil menghindari pengaruh-pengaruh korupsi yang membuat lemah bagi negara. Sebab bagi Machiavelli, kejayaan (baik pangeran maupun republik) merupakan ambisi politik definitif ⎯ yang dikejar dalam batas-batas yang ditentukan oleh akal, kearifan, nasib baik, dan kebutuhan (Losco dan William, 2005: 562).

Jika Machiavelli menandai gerakan menjauhi filsafat agama sebagai suatu dogma politik dan membukakan jalan kepada dua penerus cemerlang. *Pertama* adalah Thomas Hobbes (1558-1674) di mana filsafat materialismenya merupakan jembatan yang menguhubungkan ilmu pengetahuan dan mekanika, serta yang lokgikanya sama bagus dan rapuhnya seperti logika lain yang dapat ditemukan dalam pemikiran politik*. Kedua*, adalah Jean Jaques Rousseau, tokoh yang berusaha mendefinisikan kembali kepribadian moral dalam komunitas moral (Apter, 1996: 78-79).

Dalam buku *Leviathan* (1651)*,* Hobbes bertolak dari pengembangan pengertian negara yang jauh berbeda dengan pengertian negara pada abad pertengahan. Mereka terpaku asyik dengan komunitas organis ⎯ orang bijaksana merupakan kepala negara, rokhaniawan merupakan jantungnya, sementara berbagai organ yang berguna lainnya berkelompok membentuk keluarga atau rumahtangga dalam persaudaraan komunitas yang mencakup keseluruhan (Gierke: 1950).

Lain halnya bagi Hobbes, tidak ada komunitas alamiah yang bertindak sebagai kekuatan hidup yang segera terwujud, kecuali suatu ciptaan yang “khayal”. Komunitas itu tercipta karena manusia sebagai makhluk yang memiliki nafsu mempunyai imajinasi, kemampuan berbicara, dan terutama kemampuan bernalar. Namun nalar bisa salah, sehingga secara abstrak masyarakat tidak dapat bergantung padanya. Ia menganologikan “seperti ilmu hitung, manusia yang tidak

cakap, pasti keliru dan para professor sendiri-pun mungkin acapkali salah (Hobbes, dalam Oxford, 1909).

Selain itu karena manusia juga mempunyai segala macam sifat yang tidak begitu “terpuji” seperti; marah, sedih, serakah, maka akibatnya adalah terjadi situasi alamiah kearah konflik, yang menimbulkan kekacauan. Untuk mencegah kekacauan itu, pertimbangan-pertimbangan pribadi harus mengalah kepada otoritas. Tetapi bagaimana orang dapat dibujuk untuk mengumpulkan kekuasaan mereka dan menyerahkannya kepada penguasa? Mereka akan melakukannya hanya bila mereka memperoleh sejumlah manfaat darinya. Manfaat apa ? Suatu keadaan yang tertib atau teratur. Bagi Hobbes ketertiban merupakan sasaran tertinggi, suatu hal yang dapat dipahami leh orang yang rasional dan suatu manfaat yang nyata serta dirasakan langsung. Di sinilah peran Hobbes merupakan orang yang pertama yang dapat mendefinisikan dan mengubah kepentingan pribadi dalam keuntungan publik (Apte, 1996: 80).

 Ia memastikan bahwa nilai yang ditentukan orang pada dirinya itu berbeda bagi setiap orang. Memang, orang tidak dapat menentukan “harga’ diri mereka, tetapi nilai sesungguhnya seseorang akan diukur oleh pendapat orang lain mengenai harga diri orang tersebut. Maka dari itu kompensasi akan bervariasi, bahkan akan menimbulkan konflik juga mengingat tiadanya asas tunggal bagi pergantian yang disepakati bersama. Nafsu-nafsu kuat akan diikutsertakan. Orangorang yang besar kepala, penakut, ambisius, dan masa bodoh akan menceburkan dalam konflik yang sia-sia. Di sinilah kebijaksanaan tertinggi adalah menyerahkan wewenang kepada kekuasaan itu. Namun alternatifnya juga adalah kekacauan.

1. **Sejarah perkembangan Ilmu politik pada Zaman Modren**

Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.
Di atas telah disebutkan bahwa tokoh cemerlang lain pada masa pencerahan adalah Jean Jaques Roussea, yang mewakili sudut pandang alternatif dan memberikan kekuasaan yang besar kepada komunitas sebagai satu keseluruhan. Tetapi antara Hobbes dan Rousseau terdapat dua orang lain:

1. John Locke (1632-1704) mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku *Two Treatises on Civil Government.* *State of Nature* juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam *State of Nature* terjadi: kebingungan, ketidakpastian, ketidakaturan, tidak ada kematian. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut: hak akan hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan, hak memiliki sesuatu. Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga: legislatif, eksekutif dan yudikatif dan federatif. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas: Monarki, Aristokrasi dan Demokrasi. Tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan umat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak asasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.
2. Montesquieu (1689-1755) Montesquieu terkenal dengan dunia ilmu pengetahuan tentang negara, hukum dan kemudian dia mengemukakan *State of Nature* yang diartikan dalam keadaan alamiah kualitas hidup manusia rendah. Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya *Chek and Balance* terhadap mekanisme pembagian kekuasaan. Demokrasi yang dibentuk yaitu demokrasi liberal yang masih mengalami kekurangan. Untuk memantapkan dan menyempurnakan teori demokrasi liberal maka dibutuhkan berbagai unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukuhkan Montesquieu sebagai pencetus demokrasi liberal.
3. **Sejarah perkembangan Ilmu politik pada abad ke-19- 20**

Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.

Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga dua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalan dengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya *American Political Science Association (APSA)*  pada 1904.[[9]](#footnote-9)

Ilmu politik masa kini telah berkembang dari berbagi bidang studi yang berkaitan termasuk sejarah, filsafat, hokum dan ekonomi. Ditinjau dari tahap perkembangannya sebagai ilmu, memang tidak dapat disangkal bahwa ilmu politik agak tertinggal dibelakang jika dibandingkan dengan ilmu lainnya, seperti ilmu ekonomi yang mengalami kemajuan yang pesat seiring denagn era *“revolusi industry”* pertengahan abad XVIII.

Sesudah perang dunia ke II perkembangan ilmu politik semakin pesat. Di Negara Belanda, dimana waktu itu penelitian mengenai Negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum, didirikan *Faculteit der Sociale Wetenschappen* pada tahun1947 di Amsterdam. Akan tetapi, oleh karena pendidikan tinggi ilmu Hukum sangat maju, tidaklah mengherankan apabila pada permulaan perkembangannya, ilmu politik di Indonesia terpengaruh kuat oleh ilmu itu. Akan tetapi dewasa ini konsep-konsep ilmu politik yang berangsur-angsu mulai di kenal.

Pesatnya perkembangan ilmu politik sesuda perang dunia ke II tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutam UNESCO(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization). Terdorong oleh tidak adanya keseragaman dalam terminology dalam ilmu politik, UNESCO dalam tahun 1948 menyelenggarakan suatu survey mengenai kedudukan ilmu politik dalam kira-kira 30 negara. Proyek ini dipimpin oleh W. Ebenstein dari Princeton University Amerika Serikat kemudian di bahas oleh beberapa ahli dalam suatu pertemuan di Paris dan menghasilkan buku *“Contemporary Political Science”.[[10]](#footnote-10)*

Selanjutnya UNESCO bersama *International Political Science Association (IPSA)* yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dari *London School of Economics and Political Science* dalam buku *The University Teaching of Political Science*. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu social (termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda. Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik.

1. **Sejarah perkembangan Ilmu politik di indonesia**

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa karya yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan seperti yang ditulis dalam buku *Negarakertagama* dan *Babad Tanah Jawi* pada abad 13-15 M. Di Indonesia sendiri didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (seperti pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta) atau Fakultas ilmu-ilmu Sosial (seperti pada Universitas Indonesia, Jakarta) dimana ilmu politik merupakan Departemen tersendiri. Akan tetapi, oleh karena pendidikan tinggi ilmu Hukum sangat maju, tidaklah mengherankan apabila pada permulaan perkembangannya, ilmu politik di Indonesia terpengaruh kuat oleh ilmu itu. Akan tetapi dewasa ini konsep-konsep ilmu politik yang berangsur-angsu mulai dikenal.Perkembangan awal ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju pada saat itu.

1. Dadang supardan, *Pengantar Ilmu Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.520. [↑](#footnote-ref-1)
2. Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1. [↑](#footnote-ref-2)
3. A.Rahman Zainudin, *Ilmu Politik*,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm 21. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.56. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lan, Fu Yu, *Sejarah Ringkas Filsafat Cina (Sejak Confucius samapai Han Fei Tzu),* (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 80. [↑](#footnote-ref-5)
6. Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik,* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dadang supardan, *Pengantar Ilmu Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.526. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.,* hlm. 527. [↑](#footnote-ref-8)
9. Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.6. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.,* hlm. 7. [↑](#footnote-ref-10)